



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 38 TAHUN 2024**

**TENTANG  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana disebutkan dalam bab I huruf E nomor 11 Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 90.1.3.5/25/APB, Perihal : Penyampaian Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) APBD T.A 2024 sehingga perlu ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang ...../

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan...../

14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
16. Keputusan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 1 Februari 2024

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
8. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 38 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Februari 2024

PERIHAL : PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	NAMA/NIP/JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET		
1	PA		I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.095.422.229			
			1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.529.115.375			
			a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.529.115.375	PATIDAK DI LIMPALKAN		
			2 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	566.306.854			
			a Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	166.306.854	PATIDAK DI LIMPALKAN		
b Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	PATIDAK DI LIMPALKAN					
2	KPA	JAUBAT HARIANJA,SH,MM	II PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	13.084.900.000			
			1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota	13.084.900.000			
	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	NIP. 197306062005021002	a Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota	13.084.900.000			
		Pit.KABAG HUKUM					
3	KPA	JAUBAT HARIANJA,SH,MM	III PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.537.904.000			
			1 Administrasi Tata Pemerintahan	1.665.876.700			
			a Penataan Administrasi Pemerintahan	115.030.000			
			b Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.550.846.700			
			2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.617.895.300			
			a Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.232.415.300			
			c Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	385.480.000			
			3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	184.015.000			
			a Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	69.995.000			
			b Fasilitasi Bantuan Hukum	100.528.000			
c Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	13.492.000						
4 Fasilitasi Kerjasama Daerah	70.117.000						
a Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	70.117.000						
4	KPA	ELMAN SILALAH,SP	IV PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	317.970.640			
			ADMINISTRASI UMUM	NIP. 19760305 200604 1 005	1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.358.500	
			KABAG UMUM	a Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.358.500		
			2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	148.612.140			
			a Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	148.612.140			
5	KPA	ELMAN SILALAH,SP	V PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	64.999.900			
			ADMINISTRASI UMUM	NIP. 19760305 200604 1 005	1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	64.999.900	

		KABAG UMUM	a	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	64.999.900
6	KPA	ELMAN SILALAH,SP	VI	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.356.560.358</b>
	ADMINISTRASI UMUM	NIP. 19760305 200604 1 005	1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6.723.071.368</b>
		KABAG UMUM	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.769.476
			b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	164.832.996
			c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.103.673.200
			d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.515
			e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000
			f	Penyediaan Bahan/Material	223.747.576
			g	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.710.333.500
			h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.179.714.105
			2	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>93.800.000</b>
			a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.800.000
			3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.652.181.412</b>
			a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376.100.000
			c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.276.081.412
			4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.075.781.450</b>
			a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	799.239.200
			b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	526.760.000
			b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.725.250
			c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	678.057.000
			5	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>340.000.000</b>
			a	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240.000.000
			b	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000
			6	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>116.752.128</b>
			a	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	34.360.128
			b	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	30.008.000
			c	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	52.384.000
			7	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>274.974.000</b>
			a	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	82.908.000
			b	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	88.044.000
			c	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	104.022.000
			8	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>80.000.000</b>
			a	Fasilitasi Keprotokolan	80.000.000
7	KPA	MASRYN REPIN R SIMBOLON,ST	VII	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.024.818.588</b>
	PEREKONOMIAN DAN	NIP.19770527 200904 2 003	1	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>320.000.000</b>
	PEMBANGUNAN	KABAG PEREKONOMIAN	a	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50.000.000
			b	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	230.000.000
			c	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	40.000.000
			2	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>399.892.588</b>
			a	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	225.571.588

			b	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	174.321.000	
			<b>3</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>304.926.000</b>	
			b	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	100.000.000	
			c	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	204.926.000	

BUPATI SAMOSIR



VANDKO T. GULTOM